

**Kinerja Pemerintah Dalam Pengembangan Guru Tenaga Pendidikan
Di Dinas Pendidikan Kabupaten Minahasa Selatan**

Fillys Regar¹
Welly Waworundeng²
Sofia E Pangemanan³

Email Korespondensi: afillyregar@gmail.com

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui peran pemerintah dalam Pengembangan Guru Tenaga Kependidikan Kabupaten Minahasa Selatan. Pendidikan memberikan kontribusi yang sangat besar terhadap kemajuan suatu bangsa, dan merupakan wahana dalam menerjemahkan pesan-pesan kontribusi serta sarana dalam membangun watak bangsa. Masyarakat yang cerdas akan memberi nuansa kehidupan yang cerdas pula, dan secara progresif akan membentuk kemandirianKeberhasilan Pendidikan tidak terlepas dari sumber daya manusianya dalam hal ini tenaga pendidik.Pengembangan profesi guru hanya bisa tercapai jika didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai dan efektif untuk kegiatan pendukung kebijakan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Hasil penelitian disimpulkan bahwa Dalam pelaksanaan peningkatan ketenagakerjaan guru SMP di Kabupaten Minahasa Selatan Dinas Pendidikan dalam mengutamakan kepentingan tenaga pendidik untuk melakukan peningkatan dapat dilihat dari upaya dinas pendidikan dalam memberikan pemahaman bagi para tenaga pendidik terkait penerapan kurikulum sekolah merdeka, dimana kurikulum ini mengutamakan dan memanfaatkan perkembangan teknologi yang ada. Dalam hal ini proses penerapan kurikulum yang dijalankan oleh setiap guru khususnya pada setiap SMP yang ada di Kabupaten Minahasa Selatan tidak terlepas dari upaya Dinas Pendidikan Kabupaten Minahasa Selatan.

Kata Kunci: Kinerja, Pemerintah, Guru, Pendidikan

¹Mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan FISPOL-Unsrat

² Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan FISPOL-Unsrat

³ Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan FISPOL-Unsrat

Pendahuluan

Keberhasilan Pendidikan tidak terlepas dari sumber daya manusianya dalam hal ini tenaga pendidik. Pengembangan profesi guru hanya bisa tercapai jika didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai dan efektif untuk kegiatan pendukung kebijakan. Tentu hal ini bisa mengarahkan kepada sekolah yang berprestasi. Jika ingin sarana pembelajaran yang meningkat, sarana dan prasarana yang dimaksud harus tersedia di sekolah, sebagaimana yang diamanatkan Pasal 45 Ayat (1) UU Sistem Pendidikan Nasional. Kepala sekolah sebagai pemimpin kemajuan sekolah bertanggung jawab dalam bentuk mengusahakan instrumen pendidikan yang dibutuhkan sekolah. Aturan atau bentuk instrumen pendidikan, yaitu sarana dan prasarana merupakan salah satu faktor yang vital dalam menyelenggarakan pengembangan profesionalitas guru.

Di dalam dunia pendidikan, guru adalah seorang pendidik, pembimbing, pelatih, dan pengembangan kurikulum yang dapat menciptakan kondisi suasana belajar yang kondusif, yaitu suasana belajar yang menyenangkan, menarik, memberi rasa aman, memberi ruang pada siswa untuk berfikir aktif, kreatif dan inovatif dalam mengeksplorasi dan mengolaborasi kemampuannya.

Keberadaan pengembangan dan pembinaan profesionalitas guru mutlak dibutuhkan dalam proses pendidikan sehingga terwujudnya tujuan dari belajar mengajar yaitu yang termuat dalam pasal 3 UU Sisdiknas tahun 2003 tentang pendidikan nasional bahwa pendidikan nasional berfungsi untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak

serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga Negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Riset tentang tugas bidang guru tenaga kependidikan (GTK) mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan guru, pendidik lainnya, dan tenaga kependidikan. Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi tersebut Kepala Bidang Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan di bantu oleh 1) Seksi Guru dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal 1) Seksi Guru dan Tenaga Kependidikan Sekolah Dasar 3) Seksi Guru dan Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah Pertama.

Didalamnya juga bidang GTK harus menyusun formasi dalam pengembangan karir tenaga pendidik pada pendidikan profesi guru, serta dan tenaga pendidik juga harus sesuai dengan spesifikasi bidang ilmu dalam penempatan di sekolah guna meningkatkan pengetahuan dari setiap murid yang di ajarkan dalam proses pembelajaran.

Permasalahan yang ditemui dalam pengembangan tenaga kependidikan di Kabupaten Minahasa Selatan berupa : kekurangan guru PNS (hanya guru kontrak), ada beberapa guru yang belum bisa menguasai penggunaan computer, padahal sistem belajar sekarang harus menyesuaikan

dengan perkembangan zaman yang dimana tuntutan harus memanfaatkan teknologi untuk perkembangan siswa, ada beberapa guru yang masih tidak menekuni profesinya, hal ini disebabkan oleh karena rendahnya gaji guru honorer, kurangnya adanya pelatihan yang berjenjang untuk para guru..

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Lokasi penelitian merupakan tempat di mana peneliti melakukan penelitian terutama menangkap dari menangkap fenomena atau peristiwa yang sebenarnya terjadi dari objek yang akan diteliti dalam rangka untuk mendapatkan data-data penelitian yang akurat. Dengan mempertimbangkan data di atas dan membatasi penelitian maka penelitian ini dilakukan di Kabupaten Minahasa Selatan khususnya Dinas Pendidikan Kabupaten Minahasa Selatan.

Dalam menentukan focus penelitian, penulis akan melihat Peran Dinas Pendidikan dalam meningkatkan ketenagakerjaan guru Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Minahasa Selatan dengan melihat model pemerintahan yang baik (good governance) Menurut Mardiasmo (2004 : 18):

- a. Rule of law. Kerangka hukum yang adil dan dilaksanakan tanpa pandang bulu.
- b. Consensus of orientation. Berorientasi pada kepentingan masyarakat yang lebih luas.
- c. Equity. Setiap masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh kesejahteraan dan keadilan.
- d. Efficiency and effectiveness. Pengelolaan sumber daya publik

dilakukan secara berdaya guna (efisien) dan berhasil guna (efektif). Teknik pengumpulan data merupakan cara yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data-data penelitian dari sumber data yakni:

1. Wawancara
2. Observasi
3. Dokumentasi

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data induktif. Analisis data induktif adalah penarikan kesimpulan yang berangkat dari fakta-fakta khusus, untuk kemudian ditarik kesimpulan secara umum. Adapun langkah-langkah untuk menganalisis data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: Pengumpulan data, Reduksi data, Display Data dan Pengambilan Keputusan.

Pembahasan

a. Rule of law. Kerangka hukum yang adil dan dilaksanakan tanpa pandang bulu.

Pada indikator ini peneliti akan membahas terkait peran pemerintah dalam hal ini dinas pendidikan dalam melakukan peningkatan tenaga pendidik Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Minahasa Selatan sesuai dengan kerangka hukum yang berlaku.

Dalam hal ini peneliti mengambil landasan yuridis yang terdapat dalam Undang-undang nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dimana menjelaskan bahwa tenaga pendidik ini harus mendapatkan pembinaan karier sesuai dengan tuntutan pengembangan kualitas, hal ini dapat dilihat dari pembinaan karir atau pengembangan kualitas tenaga pendidik di Kabupaten Minahasa Selatan sudah dilaksanakan secara kelembagaan Dinas Pendidikan, peningkatan ini dapat dilihat dari bimbingan teknis yang dilakukan oleh

dinas terkait, namun peningkatan atau bimbingan teknis ini masih terdapat beberapa masalah seperti anggaran untuk para guru masih bersifat pribadi atau di tanggung sendiri oleh guru.

Padahal di dalam UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menjelaskan betapa pentingnya pemerintah dalam memberikan penghasilan dan jaminan kesejahteraan sosial yang pantas dan memadai. Melihat akan hal itu dapat dikatakan bahwa pembiayaan atau penganggaran untuk peningkatan tenaga pendidik guru di Kabupaten Minahasa Selatan belum sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang ada. Hal ini dapat dilihat bahwa dalam UU tersebut menjelaskan bahwa pemerintah harus memberikan pengembangan kualitas tenaga pendidik namun hal ini tentunya masih jauh dari harapan karena soal kesejahteraan juga masih jauh dari harapan yang ada, sehingga proses seperti ini seharusnya menjadi perhatian khusus dari pemerintah daerah yang ada, karena memang untuk melakukan peningkatan tenaga pendidik harus ada topangan dana yang memadai dan hal ini tentunya berdasarkan dengan peraturan perundangan – undangan yang berlaku.

Proses peningkatan tenaga pendidik tentunya menjadi bagian terpenting dalam hal ini harus menjadi perhatian khusus dari pemerintah untuk dapat melaksanakan hal tersebut diharapkan untuk setiap perangkat daerah yang ada untuk dapat melakukan hal tersebut dan tentunya harus ada keseriusan dari setiap pemerintah yang ada. peningkatan ini dapat dilihat dari bimbingan teknis yang dilakukan oleh dinas terkait, namun peningkatan atau bimbingan teknis ini masih terdapat

beberapa masalah seperti anggaran untuk para guru masih bersifat pribadi atau di tanggung sendiri oleh guru. Padahal di dalam UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menjelaskan betapa pentingnya pemerintah dalam memberikan penghasilan dan jaminan kesejahteraan sosial yang pantas dan memadai.

Melihat akan hal itu dapat dikatakan bahwa pembiayaan atau penganggaran untuk peningkatan tenaga pendidik guru di Kabupaten Minahasa Selatan belum sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang ada. Hal ini dapat dilihat bahwa dalam UU tersebut menjelaskan bahwa pemerintah harus memberikan pengembangan kualitas tenaga pendidik namun hal ini tentunya masih jauh dari harapan karena soal kesejahteraan juga masih jauh dari harapan yang ada, sehingga proses seperti ini seharusnya menjadi perhatian khusus dari pemerintah daerah yang ada, karena memang untuk melakukan peningkatan tenaga pendidik harus ada topangan dana yang memadai dan hal ini tentunya berdasarkan dengan peraturan perundangan – undangan yang berlaku.

b. Consensus of orientation. Berorientasi pada kepentingan masyarakat yang lebih luas. Pada indikator ini peneliti akan membahas terkait sejauh mana dinas pendidikan mengutamakan kepentingan para tenaga pendidik dalam hal melakukan peningkatan.

Secara kelembagaan Dinas Pendidikan Kabupaten Minahasa Selatan telah melaksanakan tugas mereka untuk melakukan peningkatan tenaga pendidik SMP dimana mereka rutin melaksanakan bimbingan teknis untuk dapat membantu peningkatan

kapasitas para guru yang ada karena dalam hal ini menjadi tugas yang penting untuk dinas pendidikan dalam hal melakukan peningkatan bagi para guru yang ada, oleh karena itu dinas pendidikan melaksanakan tugas mereka sesuai dengan tupoksi dan program yang ada.

Dalam pelaksanaan peningkatan ketenagakerjaan guru SMP di Kabupaten Minahasa Selatan Dinas Pendidikan dalam mengutamakan kepentingan tenaga pendidik untuk melakukan peningkatan dapat dilihat dari upaya dinas pendidikan dalam memberikan pemahaman bagi para tenaga pendidik terkait penerapan kurikulum sekolah merdeka, dimana kurikulum ini mengutamakan dan memanfaatkan perkembangan teknologi yang ada. Dalam hal ini proses penerapan kurikulum yang dijalankan oleh setiap guru khususnya pada setiap SMP yang ada di Kabupaten Minahasa Selatan tidak terlepas dari upaya Dinas Pendidikan Kabupaten Minahasa Selatan.

Proses ini menunjukkan bahwa dinas pendidikan Kabupaten Minahasa Selatan memang memperhatikan jelas para tenaga pendidik dalam hal peningkatan ketenagakerjaan. Dalam proses ini diharapkan untuk pemerintah dalam hal ini dinas pendidikan agar terus melakukan terobosan ataupun upaya peningkataan kepada semua tenaga pendidik yang ada di Kabupaten Minahasa Selatan. Karena peningkatan ketenagakerjaan tenaga pendidik ini sangat di butuhkan untuk semua guru dengan tujuan bisa bermanfaat bagi semua siswa yang ada di Kabupaten Minahasa Selatan.

Secara kelembagaan Dinas Pendidikan Kabupaten Minahasa Selatan telah melaksanakan tugas mereka untuk melakukan peningkatan

tenaga pendidik SMP dimana mereka rutin melaksanakan bimbingan teknis untuk dapat membantu peningkatan kapasitas para guru yang ada karena dalam hal ini menjadi tugas yang penting untuk dinas pendidikan dalam hal melakukan peningkatan bagi para guru yang ada, oleh karena itu dinas pendidikan melaksanakan tugas mereka sesuai dengan tupoksi dan program yang ada.

Dalam pelaksanaan peningkatan ketenagakerjaan guru SMP di Kabupaten Minahasa Selatan Dinas Pendidikan dalam mengutamakan kepentingan tenaga pendidik untuk melakukan peningkatan dapat dilihat dari upaya dinas pendidikan dalam memberikan pemahaman bagi para tenaga pendidik terkait penerapan kurikulum sekolah merdeka, dimana kurikulum ini mengutamakan dan memanfaatkan perkembangan teknologi yang ada. Dalam hal ini proses penerapan kurikulum yang dijalankan oleh setiap guru khususnya pada setiap SMP yang ada di Kabupaten Minahasa Selatan tidak terlepas dari upaya Dinas Pendidikan Kabupaten Minahasa Selatan. Proses ini menunjukkan bahwa dinas pendidikan Kabupaten Minahasa Selatan memang memperhatikan jelas para tenaga pendidik dalam hal peningkatan ketenagakerjaan.

c. Efficiency and effectiveness.

Pengelolaan sumber daya publik dilakukan secara berdaya guna (efisien) dan berhasil guna (efektif). Pada indikator ini peneliti akan membahas terkait pengelolaan sumber daya publik yang ada pada Dinas Pendidikan Kabupaten Minahasa Selatan untuk dapat melakukan peningkatan ketenagakerjaan guru SMP di Kabupaten Minahasa Selatan.

Dalam hal ini peneliti akan mengangkat terlebih dahulu terkait sumber daya manusia yang dimiliki oleh dinas pendidikan untuk melakukan peningkatan tenaga pendidik. Dari segi ini dapat dikatakan bahwa SDM yang dimiliki dinas pendidikan dalam melakukan peningkatan tenaga pendidik sudah mumpuni, karena dari segi dinas pendidikan sendiri telah menyiapkan tenaga khusus untuk memberikan pelatihan bagi guru dalam penerapan kurikulum sekolah mereka, karena penerapan kurikulum sekolah merdeka ini membutuhkan orang yang bisa menguasai IT ataupun perangkat computer yang nantinya akan menunjang bagi para guru dalam memberikan pelajaran untuk para siswa. Kemudian dari segi financial atau anggaran sendiri, dapat dilihat dari hasil penelitian yang diperoleh masih kurang dan tentunya butuh adanya penambahan anggaran khusus dalam peningkatan tenaga pendidik guru yang ada di Kabupaten Minahasa Selatan. Kemudian dari segi fasilitas sendiri tentunya membutuhkan misalnya perangkat computer dan juga jaringan yang memadai, karena segi fasilitas ini tentunya sudah terpenuhi dengan baik tinggal bagaimana dari pemerintah dalam hal ini dinas pendidikan yang mengarahkan atau mengoperasikan untuk para tenaga pendidik dalam melakukan peningkatan tenaga pendidik guru yang ada di Kabupaten Minahasa Selatan.

Dalam hal ini peneliti akan mengangkat terlebih dahulu terkait sumber daya manusia yang dimiliki oleh dinas pendidikan untuk melakukan peningkatan tenaga pendidik. Dari segi ini dapat dikatakan bahwa SDM yang dimiliki dinas pendidikan dalam melakukan

peningkatan tenaga pendidik sudah mumpuni, karena dari segi dinas pendidikan sendiri telah menyiapkan tenaga khusus untuk memberikan pelatihan bagi guru dalam penerapan kurikulum sekolah mereka, karena penerapan kurikulum sekolah merdeka ini membutuhkan orang yang bisa menguasai IT ataupun perangkat computer yang nantinya akan menunjang bagi para guru dalam memberikan pelajaran untuk para siswa. Kemudian dari segi financial atau anggaran sendiri, dapat dilihat dari hasil penelitian yang diperoleh masih kurang dan tentunya butuh adanya penambahan anggaran khusus dalam peningkatan tenaga pendidik guru yang ada di Kabupaten Minahasa Selatan. Kemudian dari segi fasilitas sendiri tentunya..

Penutup Kesimpulan

Landasan yuridis yang terdapat dalam Undang-undang nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dimana menjelaskan bahwa tenaga pendidik ini harus mendapatkan pembinaan karier sesuai dengan tuntutan pengembangan kualitas, hal ini dapat dilihat dari pembinaan karir atau pengembangan kualitas tenaga pendidik di Kabupaten Minahasa Selatan sudah dilaksanakan secara kelembagaan Dinas Pendidikan, peningkatan ini dapat dilihat dari bimbingan teknis yang dilakukan oleh dinas terkait, namun peningkatan atau bimbingan teknis ini masih terdapat beberapa masalah seperti anggaran untuk para guru masih bersifat pribadi atau di tanggung sendiri oleh guru.

Dalam pelaksanaan peningkatan ketenagakerjaan guru SMP di Kabupaten Minahasa Selatan Dinas Pendidikan dalam

mengutamakan kepentingan tenaga pendidik untuk melakukan peningkatan dapat dilihat dari upaya dinas pendidikan dalam memberikan pemahaman bagi para tenaga pendidik terkait penerapan kurikulum sekolah merdeka, dimana kurikulum ini mengutamakan dan memanfaatkan perkembangan teknologi yang ada. Dalam hal ini proses penerapan kurikulum yang dijalankan oleh setiap guru khususnya pada setiap SMP yang ada di Kabupaten Minahasa Selatan tidak terlepas dari upaya Dinas Pendidikan Kabupaten Minahasa Selatan.

Dalam hal ini peneliti akan mengangkat terlebih dahulu terkait sumber daya manusia yang dimiliki oleh dinas pendidikan untuk melakukan peningkatan tenaga pendidik. Dari segi ini dapat dikatakan bahwa SDM yang dimiliki dinas pendidikan dalam melakukan peningkatan tenaga pendidik sudah mumpuni, karena dari segi dinas pendidikan sendiri telah menyiapkan tenaga khusus untuk memberikan pelatihan bagi guru dalam penerapan kurikulum sekolah merdeka ini membutuhkan orang yang bisa menguasai IT ataupun perangkat computer yang nantinya akan menunjang bagi para guru dalam memberikan pelajaran untuk para siswa..

Saran

Disarankan untuk Dinas Pendidikan Kabupaten Minahasa Selatan dalam melakukan peningkatan ketenagakerjaan guru SMP harus berdasarkan UU yang ada, karena dalam peraturan tersebut menjelaskan bahwa Negara dalam hal ini pemerintah harus memberikan jaminan kerja dalam hal ini kualitas dan jaminan kesejahteraan dan hal ini

belum terlihat dalam penerapan peningkatan ketenagakerjaan guru SMP di Kabupaten Minahasa Selatan.

Disarankan juga untuk Dinas Pendidikan Kabupaten Minahasa Selatan dalam melakukan peningkatan ketenagakerjaan guru SMP agar lebih mengutamakan kepentingan para guru, dalam hal ini melakukan peningkatan kapasitas contohnya harus ada peningkatan anggaran untuk dapat menunjang peningkatan kapasitas guru SMP di Kabupaten Minahasa Selatan.

Daftar Pustaka

- Armstrong, M. and Baron, A. 1998. Performance Management – The New Realities. London: Institute of Personnel and Development.
- AW, Suranto, 2005, Komunikasi Perkantoran; Prinsip Komunikasi untuk Meningkatkan Kinerja Perkantoran, Cetakan I. Depok, Yogyakarta:Media Wacana.
- Dessler, Gary. 1997. Management Sumber Daya Manusia. Terjemahan. Benyamin Molan. Edisi Bahasa Indonesia. PT Prenhallind. Jakarta.
- Gomes. 2001. Manajemen sumber daya manusia. Yogyakarta : Andi offset.
- Hasibuan, M. 2003. Organisasi dan Motivasi: Dasar Peningkatan Produktivitas. Jakarta: Bumi Aksara.
- Moleong, Lexy J. 2008, Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung, PT. Remaja Rosdakarya.
- Mangkunegara, 2011. Manajemen Sumber Daya Perusahaan. PT. Remaja Rosdakarya. Bandung.
- Mangkuprawira hubeis. 2007. Manajemen Mutu Sumber Daya Manusia. Ghalia Indonesia, Bogor.

Mondy dan Noe .1993. Motivation and Work Behavior. Mc Graw Hill Book Co, New York.

Oemarhamalik. 2002. Pendidikan Guru Berdasarkan Pendekatan Kompetensi. Jakarta : Bumi Aksara.

Usaman, user Moh. 2001. Menjadi Guru Profesional, Bandung : Remaja Rosdakarya.

Pasolong harbani. 2007, Teori Administrasi Publik, Alfabeta, Bandung.

Simanjuntak. 2005. Manajemen Dan Evaluasi Kinerja. Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.

Sinamo, Jansen. 2011. Etos Kerja Profesional. Jakarta: Institut Dharma Mahardika. Sedarmayanti, 2003. Sumber Daya Manusia dan Produktivitas Kerja. Penerbit Ilham Jaya, Bandung.

Subratag gatot. 2009. Automasi Perpustakaan, Jurnal Pustakawan Perpustakaan UM, Oktober 2009.

Syiful Bahri Djamarah. 2005. Guru dan Anak Didik dalam Interaksi Edukatif, Jakarta: Rineka Cipta.

Sumber-sumber Lainnya :

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.